

INVENTARIS
ARSIP DALAM NEGERI
PERIODE 1945-1949

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN i - vii

INVENTARIS

I. SEKERTARIAT 1

Tata laksana dan Organisasi

Tata Usaha

II. PEMERINTAHAN UMUM

A. PEMERINTAHAN PUSAT 2 - 7

1. Pemerintahan

- Tata laksana dan Organisasi
- Kepegawaian
- Keuangan
- Pengadaan

2. Politik dan Keamanan

3. Kewarganegaraan

4. Agraria

B. PEMERINTAHAN DAERAH

JAWA BARAT 8 - 14

1. Pemerintahan

- Tata laksana dan Organisasi
- Kepegawaian
- Keuangan
- Pengadaan

2. Politik dan Keamanan

3. Kewarganegaraan

4. Kesejahteraan

JAWA TENGAH

14 - 19

1. Pemerintahan

- Tata laksana dan Organisasi
- Tata Usaha
- Kepegawaian
- Keuangan
- Pengadaan

2. Politik dan Keamanan

3. Kewarganegaraan

4. Agraria

5. Kesejahteraan

6. Pendidikan

JAWA BARAT 20 - 21

1. Pemerintahan

- Tata laksana dan Organisasi

2. Politik dan Keamanan

3. Kesejahteraan

4. Kewarganegaraan

INDEKS NAMA : Orang, Tempat dan Badan/Perkumpulan

PENDAHULUAN

Upaya Pembentukan Kementerian Dalam Negeri, dimulai ketika jaman Pemerintahan Balatentara Jepang. Pembagian wilayah kekuasaan pemerintahan daerah memiliki jenjang tertinggi setingkat karesidenan, dan secara hirarkis kekuasaan terbawah adalah setingkat pemerintahan desa/kelurahan. Berdasarkan Undang-undang no. 27/tahun 2602 tentang "Perubahan Tata Pemerintahan Daerah" yang ditetapkan oleh Panglima Besar Balatentara Dai Nippon pada tanggal 5, bulan 8, tahun Syoowa 17 (2062 atau 1942 M) di Batavia, Pemerintah Daerah tertinggi adalah Syuu (Karesidenan) yang dipimpin oleh Syuu-tyookan (pembesar Syuu). Syuu kemudian dibagi atas Si (Stadsgemeente) dan Ken (Regentschap). Daerah Ken terbagi atas Gun (District) dan daerah Gun terbagi atas Son (Onderdistrict), sedang daerah Son terbagi pula atas Ku (desa) (1).

Tugas-tugas dan wewenang Syuu-tyookan (pembesar Syuu) adalah menjalankan undang-undang, mengurus pemerintahan didalam Syuu dan sebagai pelaksana dan bertanggung jawab kepada Guhseikan (Pembesar Pemerintah Balatentara Dai Nippon). Di samping itu juga mengadakan Syuurei (Aturan Syuu) dalam Syuu yang diperintahnya terutama yang menyangkut pemerintahan dalam Syuu, serta melakukan pengawasan terhadap Ken-tyoo, Si-tyoo dan Keisatusyo (Kepala Kantor Besar Polisi) (2).

Sedangkan ditiap-tiap Syuu diadakan Tyookan Kanboo (Majelis Pembesar Syuu) dan 3 Bu (bagian) yaitu :

- a. Naiseibu (Bagian Pemerintahan Syuu)
- b. Keizaibu (Bagian Ekonomi) dan
- c. Keisatubu (Bagian Kepolisian)

Selain daerah-daerah diatas juga terdapat Si yang ditunjuk oleh Gunseikan (Pembesar Pemerintah Balatentara Dai Nippon) yang dinamai Tokubetu-Si (Stadsgemeente luar biasa) yang memiliki aturan-aturan tersendiri pula.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam rapatnya pada tanggal 19 Agustus 1945 telah menetapkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia akan dibagi dalam 12 Kementerian dan diantaranya adalah Kementerian Dalam Negeri. R.A.A. Wiranatakusumah (3) sebagai Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet I R.I. ini.

Akan tetapi seperti diketahui, sesuai dengan keadaan negara pada waktu itu, pemerintahan belum dapat berjalan seperti yang diinginkan. Pada mulanya kegiatan Kementerian Dalam Negeri dipusatkan di Jakarta. Karena ada pejabat-pejabat Kementerian Dalam Negeri yang diburu oleh NICA, terjadilah penyerbuan NICA ke gedung Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 29 Desember 1945 (4).

Setelah penyerbuan itu dan untuk pengamanan administrasi negara maka pada tanggal 6 Januari 1945 berangkatlah kira-kira 30 pegawai Kementerian Dalam Negeri, termasuk Kepolisian Negara, ke Purwokerto untuk menyusun organisasi Kementerian Dalam Negeri dengan meninggalkan perwakilannya di Jakarta (5). Gangguan keamanan dan teror pihak Belanda menjadi alasan hampir semua kementerian untuk memindahkan sementara kedudukannya ke Jawa Tengah dan ada yang di Yogyakarta, Surakarta dan daerah lainnya (6). Untuk memperlancar hubungan Pemerintah Pusat yang berada di Yogya dan Kementerian Dalam Negeri di Purwokerto, maka sejak triwulan kedua tahun 1947, Sekretaris Jendral Kementerian Dalam Negeri (Djanu Ismadi) di tempatkan di Yogyakarta sedangkan Sekretaris Kementerian menyelenggarakan administrasi Kementerian di Purwokerto (7).

Setelah mengalami berbagai perundingan yang gagal Belanda melakukan agresi militernya yang ke II, pada tanggal 19 Desember 1949. Sewaktu agresi militer Belanda ke I, sebagian arsip yang penting masih sempat diselamatkan tetapi saat militer Belanda menyerbu Yogyakarta, pada agresi ke II hampir seluruh arsip Kementerian Dalam Negeri terpaksa harus dibumihanguskan (8).

FUNGSI DAN TUGAS

Berbeda dengan fungsi dan tugas Syuu dan Bu pada Pemerintah Balatentara Jepang, dalam ketetapanannya pada tanggal 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan bahwa tugas Kementerian Dalam Negeri ialah mengurus Pangreh Praja, Polisi, Kooti, Agraria dan lain-lainnya (9). Secara garis besar beberapa hal pokok yang merupakan tugas Kementerian Dalam Negeri ialah :

- a. Urusan Pemerintahan Umum Pemerintahan Pusat.
- b. Urusan Pemerintahan Daerah dan Urusan Desa serta daerah yang setingkat dengan desa.
- c. Pengawasan dan bimbingan dalam hal koordinasi yang harus dilakukan oleh Kepala Daerah dan pejabat-pejabat Pamong Praja.

- d. Bantuan kepada Departemen (Kementerian-kementerian) dan Jawatan-jawatan vertikal kementerian yang bekerja di daerah atau melaksanakan tugas-tugas tersebut selama jawatan-jawatan tersebut belum mempunyai cabangnya di suatu daerah (10).

Wewenang Menteri Dalam Negeri, memimpin suatu Kementerian yang mengurus masalah-masalah kepamong-prajaan, dan mengatur pimpinan wilayah administratif dan pimpinan daerah yang berhak mengurus dan mengatur rumah-rumah tangganya sendiri (daerah otonom). Pembagian wilayah Negara Republik Indonesia saat itu untuk sementara terdiri dari 8 propinsi yang masing-masing dikepalai oleh seorang Gubernur. Pembagian selanjutnya sebagai berikut :

1. Propinsi dibagi dalam Karesidenan yang dikepalai oleh seorang Residen.
2. Gubernur dan Residen dibantu oleh Komite Nasional Daerah.
3. Untuk sementara waktu kedudukan Kooti dan sebagainya diteruskan.
4. Untuk sementara waktu kedudukan Kota (Gemeente) diteruskan sampai sekarang (11).

Beberapa waktu kemudian terjadi beberapa perubahan dalam ruang lingkup dan wewenang Kementerian Dalam Negeri, misalnya tentang kedudukan Polisi. Atas nama Pemerintah Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung mempermaklumkan pada tanggal 1 Oktober 1945, bahwa mulai tanggal tersebut segenap kantor-kantor dan badan-badan kepolisian dimasukkan kedalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri (12). Akan tetapi, terhitung mulai tanggal 1 Juli 1946, dengan Penetapan Pemerintah no. 11/SD 1946, Jawatan Kepolisian ini dijadikan jawatan tersendiri langsung dibawah pimpinan Perdana Menteri (13).

Perubahan lainnya adalah mengenai Urusan Agama. Terhitung sejak tanggal 3 Januari 1946, berdasarkan Penetapan Pemerintah no. 1/SD/1946 diputuskan bahwa Departemen Agama perlu dibentuk sehingga urusan keagamaan tidak lagi dibawah Kementerian Dalam Negeri (14).

PENATAAN

Arsip Kementerian Dalam Negeri ini diserahkan kepada Arsip Nasional oleh Sekretariat Negara dalam wujud ongkongan kertas dalam karung dan tercampur aduk bersama arsip lainnya. Penelitian pertama menunjukkan bahwa arsip Kementerian Dalam Negeri ada sejumlah 5 boks (1 meter lari). Tetapi melalui penelitian lebih mendalam, ternyata terdapat

arsip-arsip lain yang ikut terdaftar, dan pemilahan selanjutnya menunjukkan arsip Kementerian Dalam Negeri hanya terdapat sejumlah 3 boks saja.

Jenis arsip Kementerian Dalam Negeri terdiri dari : perundangan, resolusi, laporan-laporan, kegiatan Kementerian Dalam Negeri Pusat dan Kegiatan Pemerintah Daerah. Penataan selanjutnya dilakukan dengan cara memisahkan arsip-arsip tersebut, sesuai dengan fungsi dan tugas Kementerian Dalam Negeri.

Bab I dengan judul Sekretariat, meliputi masalah-masalah tata laksana dan organisasi serta tata usaha Kementerian Dalam Negeri.

Bab II dengan judul Pemerintahan Umum, meliputi Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam Pemerintahan Pusat terdapat beberapa masalah, yaitu masalah pemerintahan yang selanjutnya dibagi dalam sub masalah tata laksana dan organisasi, kepegawaian, keuangan dan pengadaan. Masalah lainnya adalah tentang politik dan keamanan, kewarganegaraan dan agraria.

Sedangkan Pemerintahan Daerah dikelompokkan menjadi beberapa daerah propinsi. Daerah Jawa Barat memiliki sub masalah-sub masalah : pemerintahan, politik dan keamanan, kewarganegaraan serta kesejahteraan.

Daerah Jawa Tengah dengan masalah-masalah : pemerintahan dengan sub-subnya, politik dan keamanan, kewarganegaraan, agraria, kesejahteraan, serta pendidikan.

Jawa Timur dengan masalah-masalah : pemerintahan dan sub masalahnya, politik dan keamanan, kesejahteraan serta kewarganegaraan.

Demikianlah penyusunan arsip Kementerian Dalam Negeri ini. Sesuai dengan keadaan pemerintahan pada waktu itu (periode 1945 - 1949) yang belum stabil, sangat sedikit arsip-arsip Kementerian Dalam Negeri yang terselamatkan. Arsip yang tersusun ini merupakan sisa-sisa yang terselamatkan itu.

Kesulitan utama penyusunan arsip ini bukan hanya karena kurangnya informasi yang diperoleh tetapi juga karena perubahan sistem pemerintahan yang tercermin pada beberapa pergantian kabinet yang pada gilirannya juga menyebabkan perubahan fungsi dan tugas lembaga-lembaga yang ada dalam struktur organisasi pemerintahan. Arsip yang hanya sedikit jumlahnya ini menjadi semakin sulit untuk diinventarisasikan.

Dari jumlah arsip yang relatif kecil ini telah diusahakan penyusunan inventaris sedemikian rupa, sehingga dilakukan sesederhana mungkin supaya mudah digunakan dan dipahami oleh yang berkepentingan sebagai jalan masuk ke sumber penelitian kearsipannya.

Jakarta, Mai 1987

Penyusun

CATATAN KAKI

1. Kan Po 1942-1943, Undang-undang No. 27 tentang 'Perubahan Tata Pemerintahan Daerah'.
2. Ibid.
3. 20 Tahun Indonesia Merdeka, jilid II hal, 131
4. Ibid, hal 162
5. Ibid.
6. Ibid, hal 172
7. Ibid, hal 192-193
8. Ibid, hal 210
9. Ibid, hal 133
10. Ibid, hal 134
11. Ibid, hal 141
12. Ibid, hal 133-134
13. Ibid, hal 179
14. Ibid, hal 171-172

DAFTAR REFERENSI

1. Kan Po 1942 – 1943
2. 20 Tahun Indonesia Merdeka, jilid II; 'Departemen Dalam Negeri'.
3. Koesnodiprojo, Himpunan Undang-undang, Peraturan-peraturan, Penetapan-penetapan Pemerintah R.I. 1945/1946. Jakarta: BP, 1976.

I. SEKRETARIAT

1. Rencana Undang-undang tahun 1947 tentang Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Disertai lampiran. Salinan. t.t. 1947. 1 jilid
2. Peraturan Menteri Keuangan, Magelang no. 7 dan 8 tahun 1947 tentang pemberian tunjangan. Stensilan. 26 Juni 1947. 1 berkas
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 19/19/13 mengenai kenaikan gaji bagi 2 orang pegawai kantor Urusan Maluku Kementerian Dalam Negeri di Yogyakarta. Disertai lampiran. Tembusan. 17 September 1948. 1 lembar
4. Maklumat Menteri Keuangan di Magelang no. 1/1947 mengenai perubahan dan penjelasan maklumat no. 17 tahun 1946. Salinan 17 Januari 1947 1 sampul
5. Pengumuman Pemerintah no. 5/1948 mengenai maksud diadakan peraturan-peraturan dalam mengadakan demonstrasi dan rapat. Turunan. 10 Maret 1948. 4 lembar
6. Surat Edaran Menteri Keuangan di Yogyakarta no. 0.P. 1- 25-7 mengenai perubahan dan penjelasan peraturan gaji dan tunjangan-tunjangan. Stensilan. 11 Desember 1947. 1 berkas
7. Maklumat Kementerian Luar Negeri di Jakarta no. 1 tentang surat ijin bepergian, disertai penjelasannya. Salinan 1 Oktober 1946. 2 lembar

II. PEMERINTAHAN UMUM

15. Daftar gaji/upah pegawai Kementerian Dalam Negeri Urusan Maluku untuk bulan Februari s/d Desember 1948. Asli, tembusan. 6 Februari - 9 September 1.948. 1 berkas
16. Daftar keterangan pegawai yang sudah bekerja pada jaman Belanda dan atau pada jaman Jepang yang dinaikkan pangkatnya di jaman Republik. Asli. Agustus - Juni 1946. 1 sampul
17. Surat Kementerian Dalam Negeri kepada kantor pengajaran daerah Istimewa Yogyakarta mengenai sdr. Soebandi, guru sekolah takyat Tjitapen untuk dipekerjakan di kantor pengajaran daerah. Tindakan. 15 Mei 1948. 1 lembar
18. Surat Sekretaris Kementerian Dalam Negeri di Purwokerto kepada pimpinan daerah seluruh Indonesia no. AX 10/1/7 mengenai pangkat-pangkat pejabat daerah. Turunan. 30 Januari 1947. 1 lembar
19. Surat-menyurat antara Kementerian Dalam Negeri dengan Walikota Sukabumi mengenai pemakaian nama pangkat yang tidak sah. Disertai lampiran. 4 Februari, 5 Maret 1947. 1 berkas
20. Surat pemberitahuan dari Kementerian Dalam Negeri bagian Pemerintahan di Yogyakarta kepada para pejabat guna membantu PMI mengumpulkan uang untuk hadiah bagi para tawanan perang. Disertai surat keterangan tentang para tawanan (17 Juni 1949). Peninggal 12 Februari 1949. 1 lembar
21. Surat dari Kementerian Kesehatan di Yogyakarta mengenai permintaan bantuan uang untuk pembersihan kota berhubung dengan datangnya utusan Rockefeller Foundation. Asli 6 Desember 1948. 1 lembar

22. Surat-surat pengurus Fonds Nasional kepada Bank Rakyat mengenai saldo Fonds Kemerdekaan Indonesia dan permintaan peminjaman uang sebesar Rp. 500.000 untuk persediaan keperluan tak terduga. Konsep. 26 Mei dan 25 Juni 1948 1 sampul
23. Surat-surat dari pengurus Fonds Nasional kepada Bank Negara maupun kepada masyarakat mengenai barang-barang perhiasan Fonde Kemerdekaan Indonesia yang tersimpan dan penggunaannya. Tembusan, tindasan. 29 Mai – 13 Agustus 1948. 1 sampul
24. Surat-menyurat antara Bank Negara dengan Fonds Nasional Indonesia mengenai simpanan uang Fonds Nasional di Bank Negara dan bank lain. 9 Juni, 11 September 1948. 2 lembar
25. Notulen rapat pengurus Fonds Kemerdekaan Indonesia Komisarus Surakarta mengenai pembentukan susunan pengurus Fonds Kemerdekaan Indonesia yang menjadi Fonds Nasional Majelis Daerah Surakarta. Salinan. 29 Juni 1948. 1 lembar
26. Surat-menyurat antara Fonds Nasional dan Munadi dari pabrik kertas Fonds Kemerdekaan Indonesia mengenai permintaan penambahan modal FKI dan mengenai permintaan kertas. 2 – 22 Juli 1948. 1 sampul
27. Surat-menyurat mengenai permintaan pinjaman uang oleh Fonds Nasional kepada Bank Negara Indonesia untuk keperluan dalam rangka ulang tahun ke-3 kemerdekaan. 26 Huli, 14 Agustus 1948. 2 lembar
28. Surat- dari pengurus Fonds Nasional Indonesia kepada pengurus pusat Fonde Perang di Yogyakarta mengenai masalah menyatukan Fonde Perang dengan Fonde Nasional. Tembusan, 31 Juli 1948. 1 lembar

29. Surat dari Majelis Komisaris Fonds Nasional Daerah Kedu kepada pengurus Fonds Nasional Indonesia mengenai nama-nama kabupaten di daerah Karesidenan Kedu. Asli. 31 Juli 1948 1 lembar

30. Surat-surat permintaan kepada Bank Negara untuk menukar uang kecil. Tembusan, tindakan 4 Agustus, 11 September 1948. 2 lembar

31. Pengumuman tentang nilai bunga kredit Bank Negara. Salinan. 19 Agustus 1948. 1 lembar

32. Surat-menyurat antara Fonds Nasional dan Bank Negara mengenai peminjaman uang untuk keperluan Fonds Nasional. 21 Agustus, 4 dan 8 September 1948. 1 sampul

33. Surat-menyurat antara Fonds Nasional Indonesia dengan Bank Nasional Indonesia mengenai penyaluran modal kepada masyarakat melalui Bank Nasional Indonesia. 8, 11 September 1948. 2 lembar

34. Surat-menyurat antara Fonds Nasional dengan Bank Rakyat mengenai usaha pendirian bank Koperasi Umum. Disertai lampiran. 28 Agustus – 7 September 1948. 1 sampul

35. Surat-menyurat mengenai perubahan dan persetujuan kredit Bank Nasional Indonesia untuk Fonds Nasional menjadi sebanyak Rp. 1.000.000 untuk pendirian ‘Gedung Nasional’. 9 dan 14 September 1948. 2 lembar

36. Surat perjanjian antara RM. Margono Djojohadikoesoemo (Presiden Direktur Bank Negara Indonesia) dengan Djohor Taib (pedagang) mengenai pembelian 2 buah gedung di Jakarta untuk kepentingan Fonds Nasional Indonesia. 1948. 2 lembar

37. Surat-surat Fonds Nasional Indonesia kepada Direksi bank Negara di Yogyakarta mengenai permohonan peminjaman timbangan. Tindakan. 13 dan 25 Oktober 1948.
2 lembar
38. Resolusi rakyat desa Tjikareo kabupaten Sumedang yang menentang keras proklamasi kemerdekaan 'Negara Pasundan' yang dipimpin oleh Soeria Karta Legawa, dan tidak mengakui adanya negara Pasundan. Asli, 17 Mei 1947.
1 lembar
39. Pedoman untuk pegawai dibawah naungan Kementerian Dalam Negeri di Purwokerto sehubungan dengan situasi, sehubungan dengan nota panglima. Disertai surat pengantar untuk pejabat-pejabat pemerintah di Jawa dan Madura. Turunan 17 Juli 1947. N.B. Nota tidak ada !
2 lembar
40. Surat permintaan/petunjuk Kementerian Dalam Negeri di Yogyakarta mengenai penyimpanan bahan-bahan makanan untuk persiapan perang. Turunan. 14 Agustus 1947.
1 lembar
41. Surat kepada pejabat pemerintahan di Yogya dan Jawa Tengah mengenai penggunaan tenaga tantara di desa-desa sebagai sumber akibat rasionalisasi. Salinan. 17 Juni 1948.
1 lembar
42. Laporan Kementerian Dalam Negeri bagian Urusan Peranakan dan Bangsa Asing, Yogyakarta mengenai keadaan sosial dan politik golongan peranakan dan bangsa asing. Tembusan. 1 Juni 1948.
1 berkas
43. Surat dari Residen Surakarta berupa penerimaan daftar nama bangsa Tionghoa dan Arab di daerah Surakarta. Disertai lampiran. Asli. 2 Oktober 1947. N.B. Tidak lengkap ! yang ada hanya nama bangsa Tionghoa.
1 sampul

44. Surat keputusan Menteri Dalam Negeri di Yogyakarta mengenai agrarian. Tindakan. 1 April 1948. 1 lembar
45. Surat-menyurat antara Kementerian Dalam Negeri bagian Agraria di Yogyakarta dengan Kepala Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai kesulitan-kesulitan sekitar masalah tanah konvensional. 17, 26 dan 31 Juli 1948. 1 sampul
46. Surat Kementerian Dalam Negeri kepada semua Gubernur, Residen dan atau Pejabat Daerah Istimewa Yogyakarta lainnya mengenai program nasional agrarian. Disertai lampiran. Pertinggal. 22 Juli 1948. 2 lembar
47. Surat Kementerian Dalam Negeri bagian Agraria mengenai pelaksanaan tentang pengembalian tanah pada para petani. Konsep, tindakan, 30 Juli, 13-20 Agustus 1948. 1 sampul
48. Surat Kementerian Dalam Negeri bagian Agraria di Yogyakarta mengenai hak Kuli Kentjeng dan tafsiran tentang arti Kuli Kentjeng. Konsep. 3 Agustus 1948. 1 lembar
49. Surat dari Keresidenan Surakarta no. 617/Agr./Rahasia mengenai penggantian peraturan residen no. 863 mengenai agraria. Disertai lampiran. Asli, 8 September 1948. 1 lembar
50. Surat dari bagian agrarian kepada Sekretariat Jendral Kementerian Dalam Negeri mengenai pidato tentang agrarian oleh Wakil Kementerian Dalam Negeri, S. Reksodihardjo pada Konferensi Jawatan-Jawatan Penerangan seluruh Jawa di Yogyakarta 12 September 1948. Disertai lampiran. Konsep, tindakan. 13 September 1948. 1 sampul

51. Laporan-laporan mengenai keadaan Sukabumi dan sekitarnya. Tindakan, Salinan, 13 dan 24 Mei 1947. 1 sampul
52. Surat-surat kawat kepada Walikota Sukabumi mengenai penunjukan Bupati Bogor atau Patih Djajoesman untuk mewakili Residen. Disertai surat pengantar. Salinan. 21 Desember 1946 – 4 Januari 1947. 1 sampul
53. Surat dari Walikota Sukabumi (Soerin Hoedaya), sebagai Badan Eksekutif Kota Sukabumi kepada Dewan Pertahanan Negara di Yogyakarta berupa pertanyaan mengenai penunjukan Sukabumi sebagai daerah militer, yang dianggap bertentangan dengan peraturan Dewan Pertahanan Negara. Tindakan. 20 Maret, 8 April 1947. 1 lembar
54. Surat dari Residen Bogor kepada Walikota Sukabumi mengenai fungsi kepala daerah (Gubernur dan Residen) sebagai koordinator jawatan cabang-cabang segenap kementerian yang ada di daerahnya. Disertai lampiran dan penjelasan. Asli. 8 Maret – 22 Mei 1947. 1 sampul
55. Surat dari Ketua Dewan Pertahanan Daerah Residen Bogor mengenai undangan untuk menghadiri pelantikan anggota baru Dewan Pertahanan Daerah Bogor. Asli. 2 Mei 1947. 1 lembar
56. Surat-surat dari Residen Bogor kepada bagian Pemerintahan mengenai penugasan pada Walikota Sukabumi untuk mengawasi organisasi-organisasi rahasia dan perkumpulan Fuk Hsing She, Mei 1947. 3 lembar

57. Surat dari seseorang, tanpa nama tentang pendapat dan saran mengenai cara dalam menghadapi situasi pemerintahan di sukabumi yang semakin genting. Tindakan. 28 Mei 1948. N.B. Tidak lengkap ! 1 lembar
58. Instruksi Badan Pengawas Bangunan-bangunan dan barang-barang. Disertai surat pengantar dari Residen Bogor kepada Walikota Sukabumi. 14 Maret 1947. Asli. 2 lembar
59. Surat-menyurat dengan Walikota mengenai penyelidikan terhadap barang-barang yang dianggap penting. 15 Juli, Agustus, Oktober, 16 Nopember 1946. 1 sampul
60. Surat undangan untuk menghadiri pertemuan pada tanggal 8 Januari 1947 dari Kepala Pengawasan Harga Keresidenan Bogor Kepada Walikota Sukabumi. Asli. 6 Januari 1947. 1 lembar
61. Surat-undangan kepada Walikota Sukabumi untuk menghadiri pertemuan di kantor Keresidenan Bogor di Sukabumi. Asli. 7 Pebruari 1947. 1 lembar
62. Surat undangan dari Komandan Ketentaraan Kota kepada Walikota Sukabumi untuk menghadiri sidang permusyawaratan tentang daerah militer. Asli, 20 Pebruari 1947. 1 lembar
63. Surat dari Walikota Sukabumi kepada wakil Residen Bogor mengenai inventarisasi barang. Peninggal. 24 Pebruari 1947. 1 sampul
64. Peraturan Dewan Pertahanan Daerah Keresidenan Bogor mengenai masalah administrasi pemerintah daerah tersebut. Disertai surat pengantar dari Walikota Sukabumi kepada kepala kantor Pekerjaan Umum di Sukabumi. Peninggal. 13 Pebruari 1947. 1 sampul

65. Surat dari Dewan Pertahanan Daerah Bogor mengenai pemindahan barang-barang penting antara lain arsip-arsip dan barang-barang perkantoran milik Walikota Sukabumi. Salinan. 18 Maret 1947. 1 sampul
66. Daftar mengenai Kokahyoo (keterangan tentang pegawai) pegawai-pegawai negeri tinggi dan menengah di Sukabumi Shiyakusho. 10-12 April 1945. 1 sampul
67. Daftar hasil pekerjaan (conduitestaten) pegawai negeri yang termasuk golongan Pamong Praja. Disertai Residen Bogor. Asli. 17 Januari 1947. 1 sampul
68. Surat-menyurat antara Residen Bogor di Sukabumi (RAAH Djajadiningrat) dengan Gubernur Jawa Barat mengenai sebutan jabatan Wakil Residen. Disertai surat pengantar kepada Walikota Sukabumi. 6 Pebruari, 7, 18 dan 25 Januari 1947. 1 sampul
69. Surat kepada Walikota Sukabumi mengenai Salinan surat dari Gubernur Jawa Barat di Tasikmalaya kepada Residen Priangan mengenai calon pegawai pemerintah dari pihak Masjoemi. Asli. 10 Maret 1947. 1 lembar
70. Surat kepada Walikota Sukabumi dari Residen Bogor mengenai Salinan surat Kementerian Dalam Negeri tertanggal 19 Pebruari 1947 no. C.X. 201/12 dan surat Gubernur Jawa Barat tanggal 1 Maret 1947 no. B437/R perihal condute pegawai. Disertai lampiran. Asli. 13 Maret 1947. 2 lembar
71. Surat dari Residen Bogor kepada Walikota Sukabumi berisi Salinan nota dari Brigade II/Siliwangi (mayor Taswin) tentang beberapa masalah ekonomi. Asli. 7 Januari 1947. 1 lembar

72. Surat-menyurat antara Walikota Sukabumi dengan Markas Brigade Siliwangi mengenai situasi kota Bogor dan sekitarnya berkenaan dengan pemakaian uang ORI dan tindakan dari beberapa anggota tantara yang membeli barang-barang dengan harga rendah paksaan di took-toko Tionghoa. Disertai lampiran. Asli, Salinan, tindasan. 2-9 Desember 1946, 7 Januari 1947. 1 sampul
73. Laporan-laporan Markas Barisan Sabilillah daerah Bogor kepada Walikota Sukabumi mengenai kegiatan-kegiatan pasukan di front. Disertai surat-surat pengantar. Asli, 7 Januari s/d 24 Pebruari 1947. 1 berkas
74. Surat dari bagian Pemerintahan Umum Keresidenan Bogor mengenai Badan Organisasi Dewan Pusat Pesindo Madiun. Disertai surat pengantar kepada Walikota Sukabumi. Asli. 8 Pebruari 1947. 2 lembar
75. Surat kepada lurah-lurah di Sukabumi mengenai permintaan bantuan dari Markas Brigade II/ Siliwangi untuk menyelidiki tantara yang masih lluka-luka. Salinan. 22 Maret 1947. 1 lembar
76. Surat wakil Tesiden Bogor kepada Walikota Sukabumi berupa penyampaian selinan surat dari wakil kepala Kepolisian Negara untuk membacakan amanat Jawatan Kepolisian Negara berkenaan dengan penandatanganan ‘Naskah Persetujuan Linggarjati’ pada tanggal 25 Maret 1947. Disertai lampiran amanat. Asli. 17 April 1947. 3 lembar
77. Surat-surat dari Komandan Ketentaraan Jota Brigade II / Divisi I Kepada Walikota Sukabumi mengenai jam malam. Disertai lampiran. Asli. 2 Agustus 1946 – 1 Maret 1947. 1 sampul

78. Pengumuman kepala polisi Kabupaten Sukabumi no. 2 mengenai penetapan peraturan polisi terhadap pengeluaran bahan majanan. Disertai surat pengantar. Salinan. 23 Desember 1946. 2 lembar
79. Surat dari Kepala Kepolisian Residen Bogor kepada Dewan Pertahanan Daerah Bogor di Sukabumi berisi kritik tentang pengiriman bahan makanan ke daerah berbahaya sehubungan peraturan Dewan Pertahanan Daerah no. 1/1947 tentang pengawasan pengiriman bahan makanan. Tembusan. 25 Pebruari 1947. 1 lembar
80. Telegram dari Kepolisian Negara kepada Kepala Kepolisian Keresidenan Jawa Barat mengenai penjagaan daerah garis demarkasi yang bersangkutan dengan peraturan Dewan Pertahanan Negara no. 30 tentang daerah militer dengan surat pengantar dari residen Bogor. Tembusan. 26 Pebruari 1947. 2 lembar
81. Surat dari Dinas Penerangan Jawa Barat kepada Gubernur Jawa Barat mengenai sikap militer Belanda terhadap penduduk Disertai lampiran surat kepada Menteri penerangan di Yogya. Tembusan. 27 Pebruari 1947. 1 lembar
82. Peraturan Dewan Pertahanan Negara. Disertai surat pengantar kepada Walikota Sukabumi. Salinan 3 Maret 1947. 1 lembar
83. Surat dari Residen Bogor kepada Walikota Sukabumi mengenai Salinan perobahanan peraturan Dewan Pertahanan Daerah Karesidenan Jakarta tentang pengiriman beras dan sebagainya keluar daerah Keresidenan Jakarta. Asli. 14 Maret 1947. 1 lembar

84. Surat dari Residen Bogor kepada Walikota Sukabumi mengenai maklumat Jaksa Agung no. 1 perihal himbauan kepada masyarakat dalam menghadapi serbuan-serbuan ancaman Belanda. Disertai lampiran. Asli. 21 April 1947. 1 berkas
85. Surat dari Inspektorat Daerah kepada Walikota Sukabumi mengenai Instruksi dari M.B.P. (Markas Besar Pertemburan) no. 1 tertanggal 12 April 1947. Disertai lampiran. Asli. 25 Mai 1947. 2 lembar
86. Surat-menyurat antara ketua Dewan Mobilisasi Sukabumi dengan Walikota Sukabumi mengenai penjelasan dan usul-usul berhubung dengan Perintah Gerakan tantara. 8 – 12 Juli 1946. 3 lembar
87. Surat dari Residen Bogor kepada Walikota Sukabumi berisi Salinan nota mengenai perbaikan hubungan antara polisi negara dengan tantara dan pembagian tugas pekerjaan yang tegas dan tepat. Asli, 7 Januari 1947. 1 lembar
88. Surat dari Tentara Pendidikan/Penerangan Brigade II/Siliwangi mengenai pemberitahuan perubahan cap stempel tantara. Asli. 20 Pebruari 1947. 1 lembar
89. Surat dari bagian I Brigade II Divisi Siliwangi kepada Walikota Sukabumi mengenai permintaan daftar orang-orang asing yang berpergian. Asli. 17 Pebruari 1947. 1 lembar
90. Daftar bangsa-bangsa asing (Eropa) penduduk kota Sukabumi Disertai surat pengantar. Asli. 4 Maret 1947. 1 lembar
91. Surat-menyurat antara Residen Bogor dengan Walikota Sukabumi mengenai permohonan persekot 1 bulan gaji atau lebih untuk tuan Kepala Bagian Pengajaran kota Sukabumi. Disertai lampiran. 27 Pebruari, 4 Maret 1947. 1 sampul

92. Surat Residen Bogor kepada Walikota Sukaumi mengenai Salinan surat Menteri Dalam Negeri tentang uang jabatan Badan Perwakilan Rakyat, Salinan 20 Maret. 1 lembar
93. Surat-menyurat antara Residen Bogor dengan Walikota Sukabumi mengenai pemberian penghargaan terhadap pegawai. 29 Nopember, 5 Pebruari 1947. 1 sampul
94. Surat kepada Kepala Dokter Balai Pengobatan dari Walikota Sukabumi mengenai pemberantasan penyakit pes. Disertai lampiran salinan surat dari pemimpin Departemen Kesehatan bagian Penyakit Menular (dr. Soemakno). Peninggal. 18 Maret 1947. 1 berkas

JAWA TENGAH

95. Surat-surat Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai permintaan uang dan bbarang-barang untuk keperluan konperensi di Kaliurang. 21 Oktober 1947, 12 Pebruari – 10 Maret 1948. 1 sampul
96. Surat-surat Jawawtan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai persiapan dan sarana rapat delegasi militer di Kaliurang. Konsep, asli, tindasan. 19 Januari 1947 – 26 Januari 1948. 1 sampul
97. Surat-menyurat antara Bupati Sleman dengan Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai petunjuk dari kabupaten pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tanggal 17 November 1947 no. 3 entang putusan DPR. 2 Desember 1947, 8 Januari 1948. 3 lembar

98. Peraturan peredaran bon sebagai pengganti sementara uang kecil di daerah Kemantren Paku Alaman yang dikeluarkan oleh PERSOPA (Persatuan Organisasi Paku Alaman). Salinan 1948. 1 lembar.
99. Surat-menyurat antara Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bantul mengenai permintaan dimuatnya Mosi DPR Kabupaten Bantul dan protes dalam surat kabar Mataram. 29 Juli, 7 September 1948. N.B. Mosi tidak ada! 2 lembar.
100. Surat dari Bupati Sleman kepada staf Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta bagian Praja mengenai penerangan kepada rakyat tentang K.M.B; Turunan, 9 September 1949. 1 lembar
101. Surat kepada Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai permohonan Kepala Sektor Sekolah Rakyat Kepanewon Tjangkringun untuk diberi harian Mataram sebagai bahan penerangan kepada murid-murid. Asli. 29 September 1947. 1 lembar
102. Berkas mengenai penerbitan HariWarti Mataram. 27 Maret – 30 September 1948. 1 sampul
103. Daftar permintaan belanja buat kepala-kepala Jawatan Kabupaten Adikarto untuk bulan Januari 1949. Asli. Desember 1948. 3 lembar
104. Daftar nama-nama calon Pangreh Praja Yogyakarta yang lulus dan daftar nama-nama Bupati Yogyakarta. Salinan. t.t. N.B. tidak lengkap! Dalam bahasa Jawa. 2 lembar
105. Uraian tentang jumlah pegawai Kabupatenn Progo, Yogyakarta. Disertai surat pengantar. Salinan 23 Juli 1946. 3 lembar

106. Surat-surat mengenai permohonan kenaikan pangkat/jabatan R. Hadisubroto. Desember 1947, 19 Januari 1948. 2 lembar
107. Surat mengenai permohonan kenaikan pangkat bagi R. Ng. Mangunbroto. 18 Desember 1948. 1 lembar
108. Daftar permohonan gaji dari kas Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk pegawai-pegawai kantor Kabupaten Adikarto dan empat Kapanewon untuk bulan Januari 1949. Asli, tembusan, 14 Desember 1948. 3 lembar
109. Daftar permohonan yang gaji dari kas Pemerintah Daerah istimewa Yogyakarta untuk pegawai Jawatan Pertanian Kabupaten Kulon Progo untuk bulan Desember 1948. Asli. 4 Nopember 1948. 1 lembar
110. Daftar surat pengantar kepada Kantor comptabiliteit Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pengiriman daftar permintaan gaji bulan Maret 1948 bagi pegawai-pegawai kabupaten dan kapanewon. Ali. 10 Nopember 1948. 1 lembar
111. Laporan Jawatan Praja D.I. Yogyakarta mengenai keadaan uang kertas rupiah. Konsep. t.t. Agustus 1948. 1 lembar
112. Daftar perincian biaya istirahat 'Goodwill Mission N.I.T. di Kaliurang tanggal 25 – 27 Pebruari 1948. 11 Maret 1948. 2 lembar
113. Surat dari pimpinan TNI bagian Masyarakat Urusan Pembelaan rakyat kepada Menteri Dalam Negeri mengenai maklumat G.P.I.I. ranting Lawijan, Solo disertai lampiran mengenai maklumat tersebut. Turunan. 22 Oktober 1947. 2 lembar

114. Daftar dan denah tempat pelacuran, minum candu dan perjudian di wilayah daerah Yogyakarta, Asli. 10 Januari 1848. 1 lembar
115. Surat Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai tugas dan sarana Detasemen Polisi. Salinan. 30 Oktober 1948. 1 lembar
116. Surat dari Residen Surakarta (Soediro) kepada Kementerian Dalam Negeri mengenai soal Muso dan pidatonya. Turunan t.t.; N.B. keadaan surat rusak! 1 lembar
117. Surat-surat mengenai orang yang ditangkap sehubungan dengan peristiwa Madiun dan aksi PKI Muso dari daerah Sleman dan Gunung Kidul. 23 September – 6 Desember 1948. 1 berkas
118. Surat kepada Walikota Yogyakarta dari Mr. Ratmoko (sekretaris Negara II) mengenai permohonan ijin untuk menjadi penduduk tetap kota Yogya. Asli. 28 Oktober 1949. 1 lembar
119. Surat dari Praja Yogya kepada redaksi ‘Hari Wartu Mataram’ berupa permintaan untuk menyiarkan peraturan Komandan Militer Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai pendaftaran tamu bagi warga pendatang, Turunan. 23 Oktober 1948. N.B. Tidak lengkap. 2 lembar
120. Laporan-laporan mengenai keadaan pertanian anak negeri daerah Istimewa Yogyakarta untuk bulan Januari – April dan Mai 1946. Disertai surat pengantar. Asli. 21 Maret, 11 Mai, 7 Juni 1946. 1 Sampul.

121. Peraturan sementara mengenai pemakaian tanah glebegan bagi perusahaan-perusahaan tetanen (onderneming-onderneming) di dalam Daerah Istimewa Yogyakarta. Salinan 10 Oktober 1946. 1 lembar
122. Datar tanah milik Kesultanan Yogyakarta yang dipakai dengan cuma-cuma oleh orang-orang bangsa Tionghoa dan Eropa. Tembusan. t.t. 1948. 2 lembar
123. Surat dari Karesidenan Surakarta Bagian Umum Urusan Agraria kepada Menteri Dalam Negeri mengenai perbaikan ketetapan tertanggal 29 September 1948, no. 1026 yang salah tik. Disertai surat pengantar. Asli. 16 Oktober 1948. 1 lembar
124. Surat-surat ketetapan Karasidenan Surakarta Bagian Umum Urusan Agraria no. 863 mengenai penyediaan tanah untuk keperluan perusahaan perkebunan dan no. 971 mengenai perubahannya. Turunan. 31 Juli, 11 September 1948. 1 lembar
125. Kutipan surat-surat keputusan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai kenaikan gaji dan pangkat. 24 April '45, 21 Jan '48, 15 Mai – 29 Mai 1948. 1 sampul
126. Kumpulan surat-surat keterangan pegawai untuk permohonan tunjangan keluarga. Desember '47, Pebruari – Desember 1948. 1 sampul
127. Daftar penerimaan pembagian hadiah celana untuk tenaga pekerja yang membantu dalam penyelenggaraan tempat rapat di Kaliurang. Disertai lampiran kwitansi. Asli. 11 Pebruari 1948. 2 lembar

128. Surat dari pemilik sekolah Kabupaten Sleman di Yogyakarta kepada pemerintah Kabupaten Banyumas mengenai permohonan kenaikan gaji untuk Soewardjo Tjokrodarsono. Disertai lampiran. Asli. 24 April 1948. 2 lembar
129. Surat dari pemilik sekolah Kabupaten Sleman, Yogyakarta kepada Kementerian dalam Negeri di Yogyakarta mengenai permohonan beras untuk guru-guru gabungan daerah Kabupaten Sleman. Tembusan. Asli. 24 April 1948. 1 lembar
130. Surat dari Jawatan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan di Yogyakarta kepada Kepala Persediaan dan Pembagian Makanan di Karesidenan Surakarta, mengenai penukaran minyak tanah dengan beras untuk kepentingan tantara dan buruh minyak di Cepu. Tembusan. 6 Desember 1948. 1 lembar
131. Surat-menyurat antara Dewan Perwakilan Daerah Yogyakarta dengan Jawatan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai sekoalh-sekolah rakyat partikelir Canisus dan Zending. Disertai lampiran. 10, 15 Maret 1948. 1 sampul
132. Surat dari Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai perencanaan percobaan 'University Extension'. Konsep 11 April 1948. 2 lembar
133. Surat-surat kepada pengurus Fonds Pertolongan PPPJ Pusat di Yogyakarta mengenai permintaan tunjangan ongkos perawatan sakit untuk Sdr. Ujadjihartono dan tunjangan kematian untuk R.P. Prodjodarminto. Asli, konsep. 4 dan 7 April 1948. 1 sampul

JAWA TIMUR

134. Surat dari Kementerian Dalam Negeri di Purwokerto kepada Gubernur Jawa Timur dan Residen Surabaya mengenai putusan Presiden tentang tugas dan kewajiban Mr. Indra Kasoema. Disertai Salinan putusan. Asli. 8 Juli 1947. 1 lembar
135. Surat-menyurat antara Gubernur Jawa Timur di Blitar dengan pejabat-pejabat pemerintahan mengenai pemindahan Kantor Gubernur Jawa Timur ke Madiun dan pembatalannya. Disertai lampiran. 8 – 11 Agustus 1947. 1 sampul
136. Nota dari Kementerian Persediaan Pembagian Bahan Makanan. 1 lembar
137. Laporan-laporan mengenai situasi dan keadaan pemerintahan di Kota Malang. Asli. 22 Juli – 31 Agustus 1947. 1 sampul
138. Laporan Bersama pamong praja dan polisi tentang jatuhnya kota Gersik. Disertai nota dari Karesidenan Surabaya untuk Gubernur Jawa Timur. Asli. 7 dan 9 Agustus 1947. 2 lembar
139. Laporan Kantor Pengawasan Peburuhan Daerah III Jawa Timur mengenai keadaan perburuan di kebun-kebun didaerah Semeru Selatan yang telah dibumihanguskan. Disertai surat pengantar dari Kementerian Perburuhan dan Sosial. Turunan. 13 April 1948. 2 lembar

140. Surat-surat kepada Gubernur Jawa Timur di Blitar mengenai adanya organisasi BAPEN (Badan Penyelidik Negara RI) yang bukan merupakan badan pemerintahan dan penggantinya APRO (Angkatan Pemuda Progresif). 13 Agustus – 28 September 1947.
1 sampul
141. Pendapat pegawai kantor Gubernur Jawa Timur (Soenarjo) berupa pendapat tentang pembentukan Kementerian Keamanan Dalam Negeri. Asli. 11 Nopember 1947. 1 lembar
142. Surat Karesidenan Surabaya di Jombang no. 114/S.S./Rahasia kepada Menteri Dalam Negeri di Yogyakarta dan Gubernur Jawa Timur di Blitar mengenai pandangan terhadap politik dalam negeri. Tindakan. 29 Maret 1948. N.B. surat tidak lengkap! 1 lembar
143. Surat penetapan Pimpinan Tentara Nasional Indonesia kepada Gubernur Jawa Timur no. 186/E/III/47 tentang pengesahan divisi X dan pengangkatan staf. Disertai surat pengantar. Tembusan. 20 Agustus 1947. 2 lembar
144. Daftar mengenai adanya pegawai kantor Gubernur yang mendapat perubahan di Madiun. Salinan. t.t. 1 lembar
145. Pedoman Gubernur Jawa Timur mengenai ekonomi tentang bahan makanan untuk Jawa Timur. Disertai kesimpulan. Turunan/pertinggal. 26 Januari 1947. N.B. merupakan bagian dari laporan daerah. 1 lembar
146. Surat-menyurat antara Residen Kediri dengan pejabat di Yogya dan Purwokerto mengenai izin bepergian bagi bangsa Tionghoa ke dan dari Surabaya dan pengembalian bangsa Tionghoa ke daerah Serikat. Disertai lampiran. 7 – 25 Januari 1947, 28 Desember 1948.
1 sampul

INDEKS

Adikarto, 103
Angkatan Pemuda Progresif, 140
APRO, 140
Arab, 43
Badan Pengawas Bangunan dan Barang-barang, 58
Badan Penyelidik Negara RI, 140
Bank Nasional Indonesia, 33, 35
Bank Negara, 23, 24, 27, 30, 31, 32, 36, 37
Bank Rakyat, 22, 34
Bantul, 99
Banyumas, 128
BAPEN, 140
Blitar, 135, 140, 142
Bogor, 52, 55
Brigade II Siliwangi, 71, 72, 75, 77, 88, 89
Canisus, 131
Cepu, 130
Conduitestaten, 67
Dewan Mobilisasi Sukabumi, 86
Dewan Pertahanan Daerah Bogor, 55, 64, 65, 79
Dewan Pertahanan Daerah Jakarta, 83
Dewan Pertahanan Negara, 53, 82
Djajadiningrat, RAAH, 68
Djojohadiningrat, RM Margono, 36
Eropa, 90, 122
Fonds Kemerdekaan Indonesia, 22, 23, 24, 25, 26
Fonds Nasional Indonesia, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37
Fonds Perang, 28
Fonds Pertolongan, 133
Fuk Hsing She, 56
Goodwill Mission NIT, 112
GFII, 113
Gunung Kidul, 117
Hadisubroto, R, 106
Hoedaya, Soerin, 53
Jombang, 142
Kaliurang, 95, 96, 112, 127
Kantor Pekerjaan Umum, 64
Kasoema, Indra, 134
Kediri, 146
Kedu, 28
Kemantren, 98

Klaten, 8
Kokahyoo, 66
Kulon Progo, 109, 105
Lawijan, 113
Legawa, Soeria Karta, 38
Linggarjati, 76
Madiun, 144
Madura, 9, 39
Malang, 11, 136, 137
Maluku, 15
Mangunbroto, R. Ng., 107
Mataram, harian, 101, 102, 119
Munadi, 26
Musso, 116, 117
Negara Pasundan, 38
Onderneming, 121
Paku Alaman, 98
Priangan, 69
Prodjodarminto, R.P., 133
Purwokerto, 18
Rasionalisasi, 41
Ratmoko, 118
REksodihardjo, S., 50
Rockefeller Foundation, 21
Sabilillah, 73
Sleman, 97, 199, 128, 129
Soebandi, 17
Soediro, 116
Soenarjo, 141
Solo, 113
Sujadihartono, 133
Surabaya, 138, 146
Surakarta, 25, 43, 124
Taib, Djohar, 36
Taswin, mayor, 71
Tionghoa, 43, 72, 122, 146
Tjangkringan, 101
Tjikareo, 38
Jjitapen, 17
Tjokrodarsono, Soewardjo, 128
Zending, 131
